

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh pemerintah yang harus dikeluarkan dan bersifat memaksa kepada warga Negara dan badan (perusahaan) bahwa sipembayar atau wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung namun pajak tersebut digunakan pemerintah untuk keperluan Negara (kemakmuran rakyat) berdasarkan UU KUP no 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1. Pajak merupakan beban yang harus dikeluarkan perusahaan secara otomatis mengurangi pendapatan perusahaan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang rendah bahwa dengan beban pajak yang rendah mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan. Dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen perusahaan melakukan upaya upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah dibebankan ke pajak. Sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak .

Banyak wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan mereka, sehingga banyak dari mereka yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin. Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang biasa disebut dengan *conflict of interest* yang memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka. Diperlukan kesadaran wajib pajak, untuk patuh membayar pajak, agar pajak yang diterima selaras dengan target yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi

wajib pajak tidak selalu patuh dalam membayar pajak, karena dapat mengurangi pendapatan yang diterimanya.

Menurut Pohan (2013) dalam (Safitri & Muid, 2020) *tax avoidance* adalah upaya memperkecil jumlah pajak terutang melalui cara yang legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak menentang ketentuan perpajakan, melainkan menggunakan cara yang cenderung memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Perusahaan pastinya mempunyai kepentingan yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* menggambarkan adanya penyampaian informasi yang tidak sesuai kepada investor yang menimbulkan adanya simetri informasi serta manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut mencerminkan tindakan manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan Dharma & Ardiana, (2016). Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Fenomena praktik *tax avoidance* terjadi pada perusahaan manufaktur yang pernah terjadi di Indonesia yaitu *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia disingkat TMMIN yang merupakan perakitan produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Komposisi kepemilikan saham diperusahaan ini adalah Astra International 5 % dan TMC menjadi 95%. Produk yang dihasilkan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meliputi : mobil Kijang Innova,

Fortuner, Rush, Yaris, Etios Valco, Vios, Limo, mesin, komponen, Dies dan Jig. PT Toyota Manufacturing Indonesia dianggap melakukan tax avoidance dengan melakukan transfer pricing. Transfer pricing merupakan proses pemindahan beban keuntungan ke perusahaan di negara lain yang menetapkan tarif pajak lebih rendah. Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Terdapat indikasi banyak perusahaan yang mengalihkan keuntungannya ke Singapura karena Singapura menerapkan tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia, sehingga sejumlah industri memiliki kantor pusat di Singapura termasuk Toyota (Kompasiana.com, 2017).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan.

Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui fakta-fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa.

Tax avoidance merupakan suatu permasalahan yang unik, karena *tax avoidance* merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain tindakan tersebut tergolong dalam tindakan legal dan tidak melanggar hukum karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013) dalam (Shantikawati, 2020) sehingga dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum kepada para pelaku tindakan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dipandang sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, akan tetapi yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat karena disisi lain perusahaan melihat bahwa tindakan *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong *et al.*, 2015) dalam (Asnawati & Nurdyastuti, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*, diantaranya yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*, *capital intensity ratio*, dan *inventory intensity ratio*.

Pengungkapan *corporate social responsibility* dipandang sebagai proses komunikasi perusahaan kepada masyarakat luas mengenai dampak social dan lingkungan yang timbul dari kegiatan ekonomi. Konsep CSR menjadi bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholde*-nya. Salah satunya adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah dalam hal pembayaran pajak. “Perusahaan” yang melakukan kegiatan CSR secara bertanggung jawab memiliki kemungkinan yang rendah untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang terlibat dalam kasus *tax avoidance* akan dinilai sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Pradipta dan Supriyadi (2015), Muzaki dan Darsono (2015), Budhi dan Dharma (2017), Putri *et al.*, (2017) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Capital intensity dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budhi dan Dharma (2017) dalam (Zoebar & Miftah, 2020) menemukan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besar intensitas aset tetap perusahaan, maka semakin meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang tinggi pula, hal ini mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Sehingga tingginya jumlah aset perusahaan akan meningkatkan tindakan *tax avoidance* yang diakibatkan oleh tingginya biaya depresiasi yang melekat pada aset tersebut. Perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang tinggi akan membayar pajak yang rendah. Karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari biaya depresiasi yang melekat pada aset. Menurut Brocher et al (2017) dalam (Zoebar & Miftah, 2020) pajak perusahaan dipengaruhi oleh aset tetap karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset yang menyebabkan timbulnya beban depresiasi atas aset tetap yang akan mengurangi pembayaran pajak (Zoebar & Miftah, 2020)

Faktor yang dinilai dapat berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak adalah *inventory intensity* dan *inventory intensity*. Menurut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, Dwiyanti, Anisa dkk, Sinaga dan Malau berpendapat bahwa *capital intensity dan inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dimana semakin besar modal yang berupa aset tetap dan persediaan dalam perusahaan, maka akan semakin bertambah juga kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akibat dari penyusutan yang terjadi pada aset tetap untuk setiap tahunnya. *Capital intensity* tersebut dapat diukur dengan total aset tetap bersih dengan total aset, dan *inventory intensity* diukur dengan total persediaan dan total aset. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi, Muzakki dan Darsono, Dharma dan Noviari berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh

Dwiyanti, yang mana menyimpulkan baik *capital intensity* maupun *inventory intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan *tax avoidance* terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Capital Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio*.

Tabel 1.2 Research Gap

No	Variabel	Peneliti	Hasil Penelitian
1	<i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Lanis dan Richardson (2012)	Berpengaruh Negatif
		Pratiwi, F. F. (2022)	Tidak Berpengaruh
2	<i>Capital Intensity Ratio</i>	Artinasari & Mildawati (2018)	Berpengaruh positif
		Iqbal (2022)	Berpengaruh Negatif
3	<i>Inventory Intensity Ratio</i>	Amelia (2015)	Berpengaruh positif
		Artinasari & Mildawati (2018)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan fenomena dan Ketidakkonsistenan pada hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti termotivasi untuk meneliti “Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure*, *Capital Intensity Ratio*, dan *Inventory Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance* pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Inventory Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *Inventori Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai informasi *tax avoidance* dan faktor apa saja yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

1.4.2 Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, memudahkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Sebagai upaya untuk menetapkan kebijakan perpajakan yang sesuai dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat membayar kewajiban perpajakannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

(Hadinata, 2019) menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang ada pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial tersebut. Dasar teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Teori Legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan segala aktivitasnya agar sesuai dengan nilai norma social yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan itu berada dengan tujuan agar perusahaan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Ketika terdapat ketidaksielarasan antara kedua sistem tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

(Doloksaribu, 2017) “ Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan “3P”.” Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Sehingga timbul pemikiran untuk menmgembangkan ilmu akuntansi dengan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) demi tercapainya sebuah keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar, yang menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan

semakin bertanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat sekitar agar sebuah organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebuah perusahaan atau organisasi juga dapat mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggungjawab sosial atau yang sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan adalah melalui pemerintah. Perusahaan bisa bertanggungjawab sosial kepada masyarakat melalui pemerintah dengan cara membayar beban pajak sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak melakukan penghindaran pajak. Karena dana pajak akan dig. unakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut (Diponegoro & Muzakki, 2015) *tax avoidance* perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab sosial oleh perusahaan”. Oleh karena itu *tax avoidance* tidak sesuai dengan prinsip CSR yang dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

2.1.2 Teori Stakeholder

Menurut (Tangdialla, 2019) stokeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. (Tangdialla, 2019) Teori Stokeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk keuntungannya

sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Dalam teori *stakeholder* dinyatakan bahwa perusahaan harus bertanggungjawab terhadap semua pihak yang terkena dampak dari kegiatannya, dengan kata lain perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemilik saham saja, melainkan juga bertanggungjawab kepada semua *stakeholder* lain yang memiliki andil bagi perusahaan dan juga yang terkenadampak dari operasi perusahaan.

Corporate social responsibility merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua stakeholdernya, oleh karena itu CSR merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Menurut (Diponegoro & Muzakki, 2015) *tax avoidance* merupakan hal yang tidak bertanggungjawab sosial. Hal ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang menyebutkan bahwa perusahaan selalu mengusahakan dukungan dari stakeholdernya.

2.1.3 Teori Agensi

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang kepada pihak yang mendapatkan wewenang kepada manajer untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan para pihak pemilik saham, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak agen (Jensen, M. C., & Meckling, 1976). Dalam sebuah perusahaan, teori agensi ini terimplementasi dalam hubungan antara pemilik saham dengan manajer. Para pemilik saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja dan *return* yang baik bagi pemilik saham.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya adalah biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat).

Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak pemilik saham, dalam hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.

2.1.4 Tax Avoidance

(Mita Dewi, 2019) *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemerintah. Menurut Prakosa (2014) (dalam (Maraya & Yendrawati, 2016) perencanaan pajak yang masih dalam koridor undang-undang disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik dan juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Menurut Landolf (2006) (dalam Diponegoro & Muzakki, 2015) *tax avoidance* perusahaan merupakan salah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab sosial oleh perusahaan. Karena perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan umum. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR), ETR adalah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Pentingnya *CSR disclosure* atau pengungkapan CSR telah membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan melakukan CSR (Artinasari & Mildawati, 2018).

Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder atau pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan untuk berlaku etis. Semakin tinggi *corporate social responsibility* yang dikeluarkan oleh perusahaan, perusahaan akan lebih bersikap etis *CSR disclosure* atau pengungkapan CSR adalah sebuah bentuk pengkomunikasian CSR yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan mengenai dampak sosial yang terjadi akibat kegiatan ekonomi perusahaan. Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan juga pengaruhnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan (Anggraeni, 2020). Oleh karena itu pengungkapan sosial atau pengungkapan CSR memiliki peran yang penting bagi perusahaan. Karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan didalam laporan baik dalam *annual report* maupun *sustainability report*. Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 dan PP No. 47 Tahun

2012, pengungkapan pertanggungjawaban sosial wajib dimuat dalam *annual report* yang dilaporkan tersedia untuk publik pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2.1.6 Capital Intensity Ratio

Capital intensity atau (rasio intensitas modal) merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan (Dharma & Ardiana, 2016). Menurut (Nugraha, 2015) capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Rodriguez dan Arias dalam (Rifai & Atiningsih, 2019) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar ETR perusahaan rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

2.1.7 Inventory Intensity Ratio

Inventory intensity ratio (rasio intensitas Persediaan) dapat di definisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada persediaan . Dalam penelitian ini *inventory intensity* diproksikan menggunakan rasio intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah seberapa besar proporsi persediaan perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan.

Inventory intensity (intensitas persediaan) mewujudkan dengan cara apa perusahaan menanamkan modalnya dalam persediaan (Nafhilla, 2022). SAK nomor 14 tentang persediaan menguraikan biaya tambahan akan timbul dari investasi perusahaan pada persediaan yang harus dikeluarkan dari nilai persediaan dan dilegalkan sebagai biaya pada periode keadaan biaya tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk persediaan harus dibebankan pada periode terjadinya biaya, setelah itu pendapatan perusahaan dapat menurun.

2.1.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu. Rincian mengenai penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
1	(Pramesti et al., 2022)	Variabel Dependen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Independen: <i>Tax Avoidanc</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> Berpengaruh Positif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
2	Pratiwi, F. F. (2022)	Variabel independen: <i>Corporate Social Resonsibility</i> Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Resonsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Rahmadani, D., & Asalam, A. (2023)	Variabel Independen: <i>Corporate Social Resonsibility</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Resonsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Safitri & Muid, (2020)	Variabel independen: <i>Corporate Social Resonsibility, Capital intensity Ratio</i> Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa <i>social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5	(Iqbal, 2022)	Variabel Independen: <i>capital intenisty Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>capital intenisty</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Irianto, Sudibyو & Wafirli (2017)	Variabel independen : <i>Protability, Leverage, Firm Size, Capital Intensity</i> Variabel Dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>Protability</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap <i>tax avoidance</i> <i>leverage</i> berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> <i>firm size</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> Sedangkan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

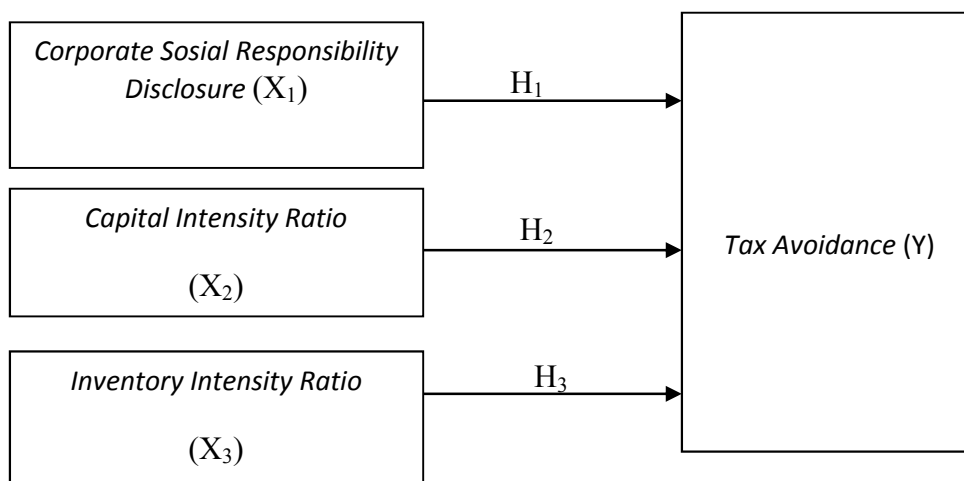
No	Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
7	Yanti dan Fatahurrazak (2017)	Variabel Independen: <i>Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Leverage</i> dan <i>Risk Managemen Comittee</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>capital intensity</i> berpengaruh positif yang signifikan, <i>inventory intensity</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif yang tidak signifikan, <i>risk managemen comitee</i> berpengaruh negatif yang tidak signifikan
8	(Fadjriana, 2019)	Variabel independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor vital yang diketahui dalam suatu masalah tertentu. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance

Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pengeluaran CSR berupa sumbangan atau biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto harus memiliki syarat wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak Sebelumnya, Pemberian sumbangan atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak, didukung oleh bukti yang sah, lembaga yang menerima sumbangan atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan penerima sumbangan atau biaya CSR bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Pemberi.

Batasan biaya CSR untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam satu tahun fiskal adalah sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal dari tahun sebelumnya. Biaya untuk pembangunan infrastruktur hanya dapat diberikan dalam bentuk sarana/prasarana yang nilainya ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana/prasarana.

Sementara batasan biaya CSR dalam bentuk sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga dapat

diberikan dalam bentuk uang/barang. Jika perusahaan memberikan dalam bentuk barang maka nilai sumbangan ditentukan berdasarkan nilai perolehan apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan, nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan, dan harga pokok penjualan apabila barang yang disumbangkan merupakan hasil produksi sendiri.

CSR dan Pajak merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan mengeluarkan biaya CSR dan pajak akan berdampak pada berkurangnya laba atau pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dan ini akan mengganggu aktivitas dari perusahaan di masa mendatang jika laba yang dihasilkan belum mencapai target dari yang direncanakan oleh perusahaan.

Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk meminimalisirkan biaya pajak untuk memaksimalkan laba dan pendapatannya dengan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan biaya yang dikeluarkan untuk CSR. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara, sehingga anggaran negara untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat juga akan berkurang.

Dengan melakukan aktivitas CSR maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang berakibat pada kecilnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis pertama, yaitu:

Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis pertama, yaitu:

H₁: *Corporate social responsibility disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Capital Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.

Seperti yang disebutkan (Sianturi et al., 2021) bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham (*principal*) dan manajemen (agen). Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan.

Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Sehingga kinerja perusahaan akan meningkat karena adanya pengurangan beban pajak, dan kompensasi kinerja manajer yang diinginkan akan tercapai.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa *capital intensity* memiliki hubungan positif dengan menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *effective tax rates* (ETR). Hal ini berarti *Capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Yang artinya semakin tinggi *capital intensity*

perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis kedua, yaitu:

H₂: *Capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Inventory Intensity Ratio terhadap Tax Avoidance

Inventory Intensity Ratio atau Intensitas Persediaan menggambarkan bagaimana Perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Wijayanti & Muid, 2020). PSAK 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Cara yang akan dilakukan adalah dengan membebankan biaya tambahan persediaan untuk menurunkan laba perusahaan sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan (Hidayah & Suryarini, 2020). Jika laba perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sinaga & Malau, 2021), Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020) menemukan *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis ketiga, yaitu:

H₃ : *Inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purpose sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilann sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu agar sampel yang terpilih lebih representatif

Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2019-2021.

2. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki laba sebelum pajak yang rugi atau negatif selama periode 2019-2021, karena akan mengakibatkan ETR yang negatif.
3. Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang mengungkapkan aktifitas CSR nya dalam laporan tahunan selama periode penelitian.

Berdasarkan Kriteria sampel diatas perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang akan digunakan untuk sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk
2.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
3.	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk
4.	CEKA	PT. Cahaya Kalbar Tbk
5.	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk
6.	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk
7.	DLTA	PT. Delta Djakarta Tbk
8.	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
9.	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
10.	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

11.	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk
12.	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
13.	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk
14.	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk
15.	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk
16.	STTP	PT. Siantar Top Tbk
17.	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
18.	GGRM	PT. Gudang Garam Tbk
19.	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
20.	DVLA	PT. Darya Varia Laboratoria Tbk
21.	INAF	PT. Indofarma Tbk
22.	KAEF	PT. Kimia Farma Tbk
23.	MERK	PT. Merck Indonesia Tbk
24.	PEHA	PT. Phapros Tbk
25.	PYFA	PT. Pyridam Farma Tbk
26.	SCPI	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
27.	TSPC	PT. Tempo Scan Pacific Tbk
28.	KINO	PT. Kino Indonesia Tbk
29.	MRAT	PT. Mustika Ratu Tbk
30.	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk
31.	HRTA	PT. Hartadinata Abadi Tbk

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sementara jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2021. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau dari website milik Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencatat data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang dicatat adalah data yang relevan dengan variabel penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel dependen (Y)

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya tindakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak perusahaan.

Tax avoidance dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). Effective Tax Rate (ETR) adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak penghasilan perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. ETR dalam penelitian ini hanya menggunakan model utama yang digunakan (Lanis & Richardson, 2012), yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan. Rasio ETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

ETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total Laba perusahaan sebelum pajak.

3.3.2 Variabel independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility* (CSR), dan *capital intensity*.

a. Corporate Social Responsibility Disclosure

CSR dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio pengungkapan CSR atau CSR *disclosure*. Penelitian ini menggunakan tabel *checklist* dengan indikator pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Indikator pengungkapan

yang dibuat GRI ini memiliki dimensi yang umum dan sektor yang spesifik, yang dapat diaplikasikan secara umum dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.

Indikator pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks GRI G.4.1 yang dibuat oleh GRI. Dalam *guidelines* G.4.1 mencakup 6 dimensi pelaporan, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat sosial, dan tanggung jawab produk. Pada setiap dimensi terdapat sejumlah indikator masing-masing yang total keseluruhannya terdapat sejumlah 91 indikator. Penghitungan ini dilakukan dengan mencocokkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan tabel *checklist*. Apabila item dalam tabel *checklist* diungkapkan oleh perusahaan maka diberi nilai 1, apabila tidak diungkapkan diberi nilai 0. Kemudian dijumlahkan semua item yang bernilai 1 dari perusahaan, kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh item pada tabel *checklist*. Rumus pengukuran rasio pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:

$$CSRDi = \frac{\sum Xi}{n}$$

CSRDi : Pengungkapan CSR perusahaan i.

$\sum Xi$: Jumlah item bernilai 1 pada perusahaan i.

n : Jumlah seluruh item indikator pengungkapan CSR (n=91).

b. *Capital Intensity Ratio*

Capital intensity dalam penelitian ini akan diproksikan menggunakan rasiointensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Rasio intensitas aset tetap diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

c. *Inventory Intensity Ratio*

Inventory intensity dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio intensitas persediaan . Rasio intensitas persediaan menggambarkan rasio atau proporsi persediaan perusahaan dari total aset tetap yang dimiliki sebuah perusahaan. Rasio Intensitas Persediaan yang diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INVNT = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

3.4 Teknik Analisis

3.4.1 Teknik Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum (Hidayat &

Muliasari, 2020). Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan karakteristik data dari sampel yang digambarkan.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai baik atau tidak. Terdapat 4 cara untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi data secara normal. Caranya ialah dengan melihat histogram dari residualnya, atau bisa juga melihat penyebaran data yang ada pada sumbu diagonal dari grafik.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi menurut Ghozal (2016) dalam (Hidayat & Muliasari, 2020). Karena model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. SMatriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (diatas 0,95), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas menurut Ghozali (2016) dalam (Hidayat & Muliasari, 2020).
2. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Cutoff*

yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai $tolerance \leq 0,10$ atau nilai $VIF \geq 10$ menurut Ghozali (2016) dalam (Hidayat & Muliasari, 2020) .

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali (2016) dalam (Hidayat & Muliasari, 2020). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Untuk mengetahui heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Park. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak di antara data pengamatan dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya (5%).

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time series*) atau ruang (*cross section*). Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson Test. Tahap kedua, yaitu analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda atau *multiple regression analysis*. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{CSR} + \beta_2 \text{CINT} + \beta_3 \text{IINT} + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Tax avoidance</i> diukur dengan proksi ETR.
α	: Konstanta
β	: Koefisien Variabel.
CSR	: <i>CSR Disclosure</i>
CINT	: <i>Capital Intensity Ratio</i>
IINT	: <i>Inventory Intensity Ratio</i>
e	: <i>Error</i> (kesalahan pengganggu).

Dengan persamaan statistik di atas, hipotesis alternatif akan diterima dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila tingkat sig dari hasil analisis lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2016) dalam (Hidayat & Muliasari, 2020).

Kelemahan mendasar koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh karena penelitian ini menggunakan banyak

variabel independen, maka penelitian ini menggunakan *adjusted* karena lebih tepat untuk mengukur seberapa jauh variabel dependen diterangkan oleh variabel –variabel independen.

3.5.2 uji statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Setiawan et al., 2016). Adapun penerimaan atau penolakan hipotesis dalam uji t berdasarkan pada kriteria berikut:

1. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.